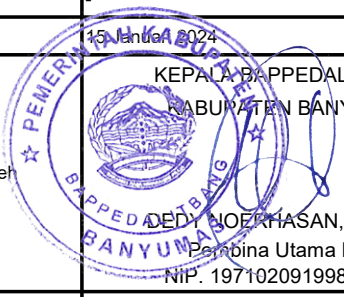



















**Pemerintah Kabupaten Banyumas**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Nomor SOP	000.8.3.3/32/2024
Tanggal Pembuatan	15 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	15 Januari 2024
Disahkan Oleh	 KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS DEDY NOERHASAN, ST., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 197102091998031003
Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo 33, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 4700)</p> <p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007)</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025</p>	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan RKPD</p>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;</li><li>2. Kebijakan pemerintah yang terkait;</li><li>3. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RKP, RKPD provinsi, RPJMD kabupaten/kota;</li><li>4. Hasil evaluasi RKPD periode lalu;</li><li>5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.</li><li>6. Perangkat Komputer</li></ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKPD ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD )**

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Bupati	APIP	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Persiapan Penyusunan RKPD												Penyusunan Rancangan Awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember T-2
a.	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang tim penyusun RKPD;									Dokumen Rancangan SK Tim Penyusun	7 Hari	Surat Keputusan	
b.	Orientasi mengenai RKPD;									Surat, Tempat, Narasumber	180 Menit	Notula Orientasi	
c.	Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD									Surat, Kertas Kerja Penyusunan Agenda Kerja	180 Menit	Agenda Kerja	
d.	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah									1. Peraturan perundang-undangan yang terkait; 2. Kebijakan pemerintah yang terkait; 3. RPJPD kabupaten, RTRW kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Provinsi 4. Hasil evaluasi RKPD periode lalu 5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.	1 Minggu	Data dan informasi bahan penyusunan RKPD	
2.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD									1. RPJMD provinsi 2. RKP dan Program strategis nasional 3. Pedoman penyusunan RKPD. 4. RPJMD kabupaten. 5. Rancangan awal RKPD provinsi. 6. Pokok-pokok pikiran DPRD. 7. SIPD	4 minggu	Dokumen rancangan awal RKPD	
3.	Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD dengan melibatkan Kepala PD dan pemangku kepentingan (stakeholder)									1. Dokumen Rancangan Awal RKPD 2. Bahan Paparan Kepala Bappeda	1 hari	Berita Acara	

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Bupati	APIP	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
4.	Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD									1. Dokumen Rancangan Awal RKPD 2. Berita Acara Kesepakatan KP RKPD 3. SE Prioritas Daerah Provinsi	1 Minggu	Dokumen rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan	
5.	Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah									1. Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah 2. Dokumen Rancangan awal RKPD	1 Minggu	Surat Edaran Kepala Daerah	Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
6.	Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah dan Rancangan Awal RKPD kepada Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan Renja PD									1. Surat Edaran kepala Daerah 2. Dokumen Rancangan awal RKPD 3. SIPD	1 hari	Tersampainya SE dan Dokumen Rancangan Awal RKPD sebagai panduan dalam penyempurnaan rancangan awal Renja PD	Penyampaian surat edaran paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.
7.	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan									a. Materi Paparan b. Usulan desa/kelurahan hasil verifikasi Bappedalitbang c. Surat Perintah Tugas d. Materi sambutan kepala Bappedalitbang	1 Minggu	Berita Acara	Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
8.	Forum Perangkat Daerah									a. Materi Paparan b. Usulan desa/kelurahan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan c. Surat Perintah Tugas d. Materi sambutan kepala Bappedalitbang	1 Minggu	Berita Acara	
9.	Penyusunan Rancangan RKPD									1. Rancangan awal Renja 2. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. 3. SE Provinsi 4. SE Kabupaten 5. Pokir SIPD	3 Minggu	Dokumen rancangan RKPD	Penyusunan Rancangan RKPD paling lambat minggu pertama bulan April.

No.	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Bupati	APIP	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
10.	Pengajuan rancangan RKPD kabupaten kepada bupati dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap: a. rancangan RKPD kabupaten/kota; dan b. pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.									1. Rancangan RKPD 2. Nota Dinas Musrenbang RKPD 3. SIPD	1 Minggu	Disposisi Pelaksanaan Musrenbang	
11.	Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan								Undangan, Tempat, Daftar Hadir, Narasumber, Dokumen Berita Acara, Dokumen Rancangan RKPD, Materi Paparan	1 hari	Berita Acara Kesepakatan	Paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.	
12.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD								1. Dokumen Rancangan RKPD 2. Berita Acara Kesepakatan 3. SIPD 4. Rancangan Renja PD	3 Minggu	Dokumen rancangan akhir RKPD		
13.	Pembahasan Rancangan akhir RKPD oleh seluruh kepala Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.								Rancangan akhir RKPD	1 Hari	Notula Pembahasan Rancangan Akhir	Pembahasan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang, Rancangan Akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.	
14.	Penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.								Rancangan akhir RKPD	1 Minggu	Rancangan Perkada RKPD		
15.	Reviu APIP RKPD								Rancangan akhir RKPD	2 Minggu	Hasil Reviu APIP		
16.	Tindak Lanjut Reviu APIP								Rancangan akhir RKPD yang telah disempurnakan berdasarkan Reviu APIP	1 Minggu	Rancangan akhir RKPD		

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Bupati	APIP	Perangkat Daerah	Kepala Bappeda	Stakeholder	Tim Penyusun	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
17.	Fasilitasi Gubernur Raperkada RKPD								1. surat permohonan fasilitasi dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi; 2. rancangan akhir RKPD; 3. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD; 4. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; 5. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD. 6. Hasil Reviu APIP RKPD	4 Minggu	Surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.	
18.	Penyempurnaan rancangan Perkada RKPD								1. Rancangan Perkada RKPD 2. Surat Gubernur Hasil Fasilitasi Raperkada RKPD 3. Hasil Harmonisasi	1 Minggu	Rancangan Perkada RKPD	
19.	Penyapaian Rancangan Perkada tentang RKPD (yang telah disempurnakan) oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.								Raperkada tentang RKPD	1 Minggu		Disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
20.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD								Raperkada tentang RKPD	1 hari	Perbup RKPD	Paling Lambat 1 Minggu Setelah RKPD Provinsi Ditetapkan
21.	Penyampaian Dokumen RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi								Perbup RKPD	Paling lama 7 hari setelah ditetapkan		